

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1999
- Barda Nawawi A., *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1992
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 1968
- Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, S.H., *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 3*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 1996
- DR. JUR. M. Udin Silalahi, S.H., LL.M., *Badan Hukum & Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta 2005
- Longman, *Dictionary Contemporary English*, Longman Group UK Limited, 1987
- Mahrus Ali, S.H., M.H., *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002
- M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2013
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001

Stephen H. Gifis, *Barron's Legal Guides in Books*, 1984

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung 1978

Sofian Effendi Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta 2012

B. Makalah

Arif Afandi, *Problematika Pengelolaan Piutang BUMD dan Prospeknya Pasca RUU Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah*, dalam Seminar Sehari “Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam konteks RUU Piutang Negara, Jakarta, 10 Oktober 2012

Dr. Harry Azhar Aziz, M.A., *Urgensi Rancangan UU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah bagi BUMN dan BUMD dari sudut Pandang Pengawasan Legislatif*, dalam Seminar Sehari “Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam konteks RUU Piutang Negara, Jakarta, 10 Oktober 2012

Drs. Mantaris Siagian, M.A., *Pengelolaan Piutang BUMN dari Rezim Keuangan Negara ke Rezim Korporasi*, dalam Seminar Sehari “Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam konteks RUU Piutang Negara, Jakarta, 10 Oktober 2012

Prof. Erman Radjagukguk, *Penyelesaian Piutang Macet BUMN dan BUMD menurut UU Keuangan Negara dan UU Perseroan Terbatas*, dalam Seminar Sehari “Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam konteks RUU Piutang Negara, Jakarta, 10 Oktober 2012

Soepomo, S.H., LL.M., *Arah Kebijakan Pengurusan Piutang Macet BUMN dan BUMD menurut UU Keuangan Negara dan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah*, dalam Seminar Sehari

“Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam konteks RUU
Piutang Negara, Jakarta, 10 Oktober 2012

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar (UUD) 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan
Penyederhanaan perusahaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum),
dan Perusahaan Perseroan (Persero)



Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan
Piutang Perusahaan Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan
Piutang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang
Pengurusan Piutang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tanggal 25
September 2012

D. Bahan Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_usaha

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>

<http://ilmuperbankan.blogspot.com/2010/02/berdasarkan-kata-kalimat-dari-huruf-h.html>

<http://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/>

<http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=164&t=tak%20Masalah%20Hapus%20Buku%20sepanjang%20normal%kat=akuntanso>

<http://kbbi.web.id/>

<http://repository.mb.ipb.ac.id/1014/5/13e-05-mintarsih-bab1pendahuluan.pdf>



<http://www.antaranews.com/berita/314341/asia-mulai-terkena-pengaruh-krisis-global>

<http://www.bumn.go.id/daftar-bumn/>

<http://www.jurnalhukum.com/perbedaan-hukum-privat-dan-hukum-publik/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2a8ab3ca401/pemerintah-dan-dpr-kaji-piutang-bumn>

<http://www.metris-community.com/dampak-krisis-ekonomi-global>

<http://www.peribahasaindonesia.com/penulisan-catatan-kaki-yang-benar/>